

ABSTRAK

Rawapening adalah suatu wilayah perairan yang sangat luas di Kabupaten Semarang dengan luas mencapai 2.670 hektar, yang mengandung potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Potensi yang berada di Rawapening ini dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan petani ikan di dalam kegiatan penangkapan dan budidaya ikan.

Pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening. Agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus, maka dijaga kelestarian dan keseimbangan populasi ikan-ikannya dengan jalan mengadakan pengelolaan perairan Rawapening dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan memaparkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini yakni deksriptif analitis dan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001. Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 dapat didasarkan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal didasarkan pada perkembangan alamiah Rawapening itu sendiri yaitu dengan merebaknya eceng gondok sebagai hambatan baru dalam pengelolaan sumber daya ikan di rawapening. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh peran pemerintah daerah yang kurang adaptif dalam menanggulangi permasalahan baru melalui aturan hukum maupun kebijakan non-hukum dalam melaksanakan tata kelola sumber daya ikan di Rawapening.

Kata Kunci: Rawapening, Sumber Daya Ikan, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Rawapening is a very large water area in Semarang Regency with an area of 2,670 hectares, which contains enormous fish resource potential. The potential in Rawapening can be utilized by fishermen and fish farmers in fishing and fish farming activities.

Management of fish resources in Rawapening is regulated in Semarang Regency Regional Regulation Number 25 of 2001 concerning Management of Fish Resources in Rawapening. So that fish resources can be utilized optimally and continuously, the sustainability and balance of the fish population is maintained by managing the Rawapening waters as well as possible. This research aims to explain the implementation of Semarang Regency Regional Regulation Number 25 of 2001 concerning Management of Fish Resources in Rawapening.

This research method is normative juridical with a statutory approach. The specifications of this research are analytical descriptive and prescriptive. The type of data used is secondary data collected by literature search using qualitative analysis methods.

The results of the research show that in the management of fish resources in Rawapening there are still obstacles faced in implementing Semarang Regency Regional Regulation Number 25 of 2001. Obstacles in implementing Semarang Regency Regional Regulation Number 25 of 2001 can be based on two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors are based on the natural development of Rawapening itself, namely the spread of water hyacinth as a new obstacle in managing fish resources in Rawapening. Meanwhile, external factors are caused by the role of local government which is less adaptive in dealing with new problems through legal regulations and non-legal policies in implementing fish resource management in Rawapening.

Keywords: Rawapening, Fish Resources, Regional Regulations